STUDI KEBUTUHAN INFORMASI PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
(Studi empiris pada DPRD dan SKPD se-Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Srata Satu pada Fakultas Ekonomi

Oleh:

Siswita Novia
2010/ 56292

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

STUDI KEBUTUHAN INFORMASI PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
(Studi empiris pada DPRD dan SKPD se Kota Padang)

NAMA	**: SISWITA NOVIA**
BP/NIM	**: 2010/56292**
PROGRAM STUDI	**: AKUNTANSI**
KEAHLIAN	**: SEKTOR PUBLIK**
FAKULTAS	**: EKONOMI**

Padang, Februari 2015

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**
NIP. 19771123 200312 1 003	**NIP. 19730213 199903 1 003**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP.19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang ***(Studi empiris pada DPRD dan SKPD se Kota Padang)***

NAMA	**: SISWITA NOVIA**
BP/NIM	**: 2010/56292**
PROGRAM STUDI	**: AKUNTANSI**
KEAHLIAN	**: SEKTOR PUBLIK**
FAKULTAS	**: EKONOMI**

Padang, Februari 2015

Tim Penguji	**Nama**	**Tanda Tangan**
1. Ketua	**: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**	
2. Sekretaris	**: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**	
3. Anggota	**: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc**	
4. Anggota	**: Nelvirita, SE, M.Si, Ak**	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Siswita Novia
NIM / BP	: 56292 / 2010
Tempat / Tanggal Lahir	: Batusangkar/ 21 Juli 1992
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jl. Pinang Sori 2 No. 18 Polonia Tunggul Hitam Padang
No. HP / Telepon	: 085365168818
Judul Skripsi	: Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang (studi empiris pada DPRD dan SKPD se- Kota Padang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis / skripsi ini adalah hasil tulisan sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP atau perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini sah telah ditanda tangani oleh tim pembimbing, tim penguji, danketua program studi.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Februari 2015

Yang membuat pernyataan

Siswita Novia

NIM : 56292 / 2010

ABSTRAK

Siswita Novia (56292) : **Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Studi empiris pada DPRD dan SKPD kota Padang).**

Pembimbing : **1. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**
2. Fefri Indra Aza, SE, MSc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna atas laporan keuangan dan membandingkan informasi yang dibutuhkan oleh DPRD dengan SKPD. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat Komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah DPRD dan SKPD Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*, dengan jumlah responden 77. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing anggota DPRD dan Kepala Bagian Keuangan dan Staf Keuangan pada setiap SKPD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskripitif dan uji t dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah, Sementara itu terdapat perbedaan antara informasi yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu informasi kinerja. Informasi kinerja lebih dibutuhkan oleh DPRD dibandingkan dengan SKPD.Kemudian yang terakhir tidak terdapat perbedaaan yang signifikan antara informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Dari hasil penelitian ini terlihat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, sebaiknya eksekutif menyusun laporan keuangan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pengguna sehingga pengguna dapat menggunakan nya dengan baik untuk pengambilan keputusan.2) Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.3) Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk melengkapi sampel pengguna laporan keuangan lain seperti masyarakat, investor, kreditor dan badan pengawas.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang". Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, dan arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita SE, Msi Ak (almrh), Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak dan Ibu pada masing-masing SKPD dan DPRD di Lingkungan Pemko Padang yang telah membantu penulis dengan memberikan data penelitian.
5. Kedua Orang Tua (Ayahanda Anis dan Ibunda Ermalina), Uni Dewi, Uda Beni dan Adik (Cindy), yang tercinta (Rizki Suryaman) beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, do'a tulus ikhlas serta dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2010.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR LAMPIRAN..... ix

BAB I. PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori 8

1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah..... 8

2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah..... 9

3. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah 13

4. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah..... 18

5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan..... 21

6. Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan..... 26

7. Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan..... 27

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 32

C. Kerangka Konseptual..... 37

D. Hipotesis 39

BAB III. METODE PENELITIAN .....

A. Jenis Penelitian 40

B. Populasi, Sampel dan Responden..... 40

C. Jenis Dan Sumber Data 42

D. Metode Pengumpulan Data 42

E. Instrumen Penelitian 43

F. Metode Analisis Data..... 46

1. Uji Validitas dan Reliabilitas..... 46

2. Analisis Deskriptif 48

3. Uji beda 50

G. Hasil Uji Coba Instrumen..... 50

H. Definisi Operasional 52

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....

A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... 54

B. Demografi Responden 55

C. Analisis Deskriptif Jawaban Responden..... 60

D. Uji beda (uji t) 65

1. Uji Normalitas..... 65

2. Uji Hipotesis..... 67

E. Pembahasan 70

BAB V. PENUTUP .....

A. Kesimpulan 77

B. Keterbatasan 77

C. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jenis Informasi Yang dibutuhkan berdasarkan riset terdahulu 34
2. Daftar Nama SKPD Kota Padang 41
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian..... 44
4. Daftar Skor 46
5. Nilai *Cronbach's Alpha Corrected dan Item-Total Correlation* Instrumen Penelitian 52
6. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 55
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 56
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 57
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... 58
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 59
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan..... 59
12. Tabel TCR Jawaban SKPD dan DPRD 60
13. Tabel Informasi Yang Paling dibutuhkan SKPD dan DPRD..... 62
14. Tabel TCR Jawaban SKPD 63
15. Tabel TCR Jawaban DPRD..... 64
16. Uji Normalitas Residual..... 66
17. Uji t (hipotesis 1) 67
18. Uji t (hipotesis 2) 68
19. Uji t (hipotesis 3) 68
20. Uji t (hipotesis 4) 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Konseptual 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
3. Tabel TCR Jawaban SKPD dan DPRD
4. Tabel TCR Jawaban SKPD
5. Tabel TCR Jawaban SKPD
6. Hasil Uji Normalitas Residual
7. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya untuk mewujudkan *good government governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada satu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk pelaporam keuangan, dimana kita dapat melihat segala hal yang terjadi di dalam entitas tersebut, yaitu pemerintahan.

Setiap instansi yang ada di Indonesia harus menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu pertanggungjawabannya kepada negara. Laporan Keuangan yang disajikan harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut PP 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang harus disajikan itu meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran berlebih, neraca (laporan posisi keuangan), laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, (d) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Informasi akuntansi yang tersaji didalam pelaporan keuangan pemerintahan digunakan oleh berbagai pengguna. Mardiasmo (2004) mengidentifikasi sepuluh pemakai laporan keuangan pemerintah yaitu: (1) pembayar pajak *(tax payer)*, (2) pemberi dana bantuan *(grantors)*, (3) investor dan kreditor, (4) pengguna jasa *(fee-paying service recipients)*, (5) karyawan/pegawai, (6) pemasok *(vendors)*, (7)

dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih *(voters),* (10) badan pengawas *(oversight bodies).*

Masing-masing kelompok pengguna akan membutuhkan informasi yang berbeda dari laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Anthony (1978) dalam Jones dan Pendlebury (2000) membagi empat kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu (1) menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap *survive* dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat *(financial viability),* (2) membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan *(fiscal compliance),* (3) menilai kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin *(management performance),* (4) membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang *(cost of service provided).*

Penelitian ini didasarkan pada fenomena dari beberapa studi tentang ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan penggunanya, yaitu Carlson (1986), Daniels and Daniels (1991), Yuliari (2003), Martiningsih (2010) serta Armel (2010). Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu Anthony (1978), Drebin (1981), Jones (1985), Daniels and Daniels (1981), serta Mack and Ryan (2006). Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah berdasarkan riset terdahulu yaitu: (1) Kondisi keuangan, (2) kondisi ekonomi, (3) kepatuhan terhadap aturan, (4) kinerja, (5) perencanaan dan penganggaran, (6) naratif.

Sementara itu pengguna di Indonesia belum memanfaatkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah antara lain disebabkan oleh lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman SDM pemerintah terhadap akuntansi pemerintahan itu sendiri (Hapsari, 2008).

Regulasi akuntansi pemerintah di Indonesia menggunakan referensi internasional yaitu IPSAS dengan memperhatikan praktik yang lazim berlaku di Indonesia. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah tidak diawali dengan riset "kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah di Indonesia". Akibatnya, proses awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam dan isi laporan keuangan lebih merupakan proses kajian pustaka. Ini tentunya tidak mendasarkan pada kondisi riil kebutuhan masyarakat (Bastian, 2006) dalam Armel (2010). Untuk itu perlu dilakukan riset dalam akuntansi sektor publik untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna dalam laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini akan difokuskan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh DPRD dan SKPD. DPRD dan SKPD memiliki kebutuhan informasi yang berbeda atas laporan keuangan

DPRD sebagai wakil atau representasi rakyat daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mempengaruhi dan memutuskan kebijaksanaan daerah terutama kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. DPRD sebagai salah satu pemakai laporan keuangan pemerintah memiliki kebutuhan akan

informasi dalam laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD itu sendiri. Untuk itu disamping harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, informasi tersebut juga harus mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder.

SKPD memerlukan informasi keuangan untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang diterapkan, menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin dan juga untuk membantu perencanaan dan pengendalian pengukuran kinerja serta membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Penelitian ini akan bermanfaat dalam menentukan tingkat kepentingan informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan ke DPRD. Walaupun studi ini tidak menjelaskan nilai berupa angka dari informasi tersebut, namun dengan mengetahui informasi yang dibutuhkan diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai**: "Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kebutuhan informasi kondisi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat perbedaan kebutuhan informasi kinerja yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat perbedaan kebutuhan informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbedaan kebutuhan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan.
2. Perbedaan kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan.
3. Perbedaan kebutuhan informasi kinerja yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan.
4. Perbedaan kebutuhan informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintah (sebagai pengguna dan penyaji laporan keuangan)

   Mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian laporan keuangan secara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses laporan keuangan tersebut.

2. Bagi Masyarakat

   Mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan informasi keuangan dari pemerintah, sehingga berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong peningkatan peningkatan kinerja keuangan pemerintah.

3. Bagi Akademis

   Untuk menambah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan memberi sumbangan pemikiran atau ide untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode.

2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut PP 71 tahun 2010, komponen laporan keuangan terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ihktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

1) Pendapatan LRA, adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Berlebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2) Belanja, adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3) Transfer, adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4) Pembiayaan, adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh Laporan Posisi Keuangan antara lain:

1) Aset, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan, yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2) Kewajiban, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3) Ekuitas, adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan pnggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari:

1) Pendapatan LO, adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2) Beban, adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3) Transfer, adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagin hasil.
4) Pos Luar Biasa, adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian / transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari:

1) Penerimaan kas, adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/ Daerah.
2) Pengeluaran kas, adalah semua alian kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/ Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebenarnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Opeasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntasi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro.
3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaki-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan

keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitias pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan pelaporan keuangan yang dikemukakan dalam Lampiran E.II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Drebin (1981), tujuan laporan keuangan pemerintah diturunkan dari kebutuhan penggunanya. Demikian juga yang dinyatakan oleh International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study no 1 bahwa tujuan laporan keuangan hanya valid jika merefleksikan informasi pengguna laporan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

   Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

   Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information)*

   Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

   Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

   Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai

kepada pengguna yang dipengaruhi pegawai dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi keampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah :

a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

4. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut PP 71 tahun 2010 pengguna laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat;
b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
d. Pemerintah.

Menurut Misra dalam Armel (2010), informasi akuntansi pemerintah digunakan oleh:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah.

b. Badan Pengawas

   Badan Pengawas adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

c. Investor, Kreditor dan Donatur

   Pihak eksternal yang termasuk dalam investor, kreditor dan donatur meliputi badan atau organisasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun lembaga lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan pemerintah daerah.

d. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintahan Daerah

   Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori analis ekonomi dan pemerhati pemerintahan daerah merupakan pihak-pihak, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain, yang menaruh perhatian atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

e. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintahan daerah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah.

f. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemerintah daerah karena tentunya memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur/bupati/walikota sebagai wakil pemerintah di daerah.

g. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) lain

Pemerintah suatu daerah dengan daerah lain saling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam rangka melakukan pinjaman.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 16 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

a. masyarakat;
b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
d. pemerintah.

Berdasarkan penelitian Drebin et al. (1981) dalam Jones dan Pendlebury (2000) menjelaskan bahwa stakeholder pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pembayar pajak (*taxpayers*)
b. Pemberi dana bantuan (hibah)
c. Investor
d. Pengguna Jasa
e. Karyawan
f. Pemasok
g. Dewan Legislatif
h. Manajemen
i. Pemilih
j. Badan Pengawas.

5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

1) Memiliki manfaat umpan balik *(Feedback Value)*

   Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif *(Predictive Value)*

   Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat Waktu

   Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

   Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

5) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi *(Veriability)*

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

b. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

c. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2004 dalam Harahap (2003:126), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang memiliki kualitas yang relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi pada masa lalu.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur *(faithful representation)* dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat Dibandingkan

Pemakai laporan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifiksi kecenderungan *(trend)* posisi dan kinerja keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Ketaatan pada standar akuntansi, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan membantu pencapaian daya banding.

Accounting Principle Board (APB) Statements No 4 dalam Harahap (2007:123) tujuan kualitatif laporan keuangan:

a. Relevance

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai laporan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Understandability

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya.

c. *Verifiability*

Hasil akuntansi harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

d. *Neutrality*

Laporan akuntansi harus netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu saja.

e. *Timeliness*

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.

f. *Comparability*

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.

g. *Completeness*

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai.

6. Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah

Pada dasarnya masyarakat memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :

a. Hak untuk mengetahui (Right to know), yaitu :

1) Mengetahui kebijakan pemerintah

2) Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
3) Mengetahui alasan yang dilakukannya untuk suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

b. Hak untuk diberi informasi (*Right to be informed*), yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
c. Hak untuk didengar aspirasinya *(Right to be heard and to be listened to).*

7. Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan

Menurut PP 71 tahun 2010, kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan terdiri dari:

a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan sspesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan *(Statutory Reports).*Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

b. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan berbasis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

c. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan infornasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

Masing-masing kelompok penguna mungkin saja membutuhkan informasi yang berbeda dari laporan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, Anthony (1978) dalam Jones dan Pendlebury (2000) membagi empat kebutuhan pengguna terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu :

a. Financial viability

Yaitu menilai kemampuan keuangan pemerintah untuk tetap *survive* dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

b. Fiscal compliance

Yaitu untuk membandingkan antara pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan.

c. *Management performance*

Yaitu menilai kemampuan manajemen (pemerintah) untuk menggunakan dana yang ada sebijak mungkin.

d. *Cost of service provided*

Yaitu untuk membandingkan antara tujuan organisasi dengan kebutuhan yang sekarang dan yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2002) kebutuhan infomasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

a. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
b. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.
c. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, san solvabilitas.
d. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
e. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

f. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

Menurut Martiningsih (2010) informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Informasi kondisi keuangan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan dan perubahannya, hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah.
b. Informasi kepatuhan terhadap aturan, yaitu informasi yang bermanfaat memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya.
c. Informasi Kinerja, yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi pemerintah daerah.
d. Informasi perencanaan dan penganggaran, yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah.
e. Informasi naratif, yaitu informasi yang berisi overview operasi pemerintah, deskripsi sebelum laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban kepada pemerintahan serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut Willy Nofranita (2011) informasi yang dibutuhkan oleh DPRD atas Pelaporan Keuangan antara lain:

a. Informasi kondisi keuangan, informasi ini dibutuhkan oleh DPRD berkaitan dengan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah, untuk melihat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana pendapatan atau pengeluaran pemerintah pada periode yang bersangkutan

b. Informasi Kepatuhan terhadap aturan, DPRD membutuhkan informasi penyelenggaraan APBD apakah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Informasi kinerja, Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan rencana srategik dan prioritas program yang telah ditetapkan serta dapat dipertangggungjawaban.

d. Informasi Perencanaan dan Penganggaran mengenai informasi target penerimaan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran dimasa datang. DPRD membutuhkan informasi ini untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kepada program yang menjadi prioritas dalam pelaksanaannya dan perencanaan anggaran nantinya sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD.

Menurut Mardiasmo (2002), pemerintah sebagai manajemen publik salah satunya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), membutuhkan informasi atas pelaporan keuangan pemerintah. Informasi yang diperlukan oleh manajemen publik antara lain:

a. Informasi Kondisi Keuangan

   SKPD memerlukan informasi keuangan salah satunya informasi akuntansi untuk membantu perencanan dan pengendalian organisasi dan juga sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

b. Informasi Kinerja

Informasi kinerja dibutuhkan untuk melihat pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan dana sebijak mungkin, untuk membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis, serta untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian target.

c. Informasi Kepatuhan terhadap Aturan

Informasi ini diperlukan untuk melihat apakah pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan .

d. Informasi Perencanaan dan Penganggaran

Untuk melihat daftar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Anggaran digunakan oleh manajemen publik sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu Anthony (1978), Drebin (1981), Jones (1985) dalam Martiningsih (2008). Kemudian dilanjutkan oleh Daniels and Daniels (1991), serta Mack and Ryan (2006) dalam Martiningsih (2010).

Armel (2010) melakukan penelitian mengenai kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah,

penelitiannya menunjukkan bahwa informasi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif di dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aturan pelaporan pemerintah belun sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor, hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor secara serempak berpengaruh terhadap kebutuhan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Willy melakukan penelitian pada tahun 2011 mengenai kebutuhan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan daerah yang paling dibutuhkan DPRD yakni informasi kepatuhan aturan, informasi kinerja, infornasi perencanaan anggaran dan informasi keuangan.

Yuliari (2003) melakukan penelitian tentang kebutuhan dan permintaan stakeholders akan informasi pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggali lebih dalam dan mengidentifikasi mengenai hal-hal penting yang diinginkan oleh stakeholders sehubungan dengan pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan kebutuhannya dari laporan keuangan tersebut. Hasil penelitian tentang kebutuhan dan permintaan stakeholder akan informasi pelaporan keuangan pemerintah antara lain, stakeholders membutuhkan informasi yang terklarifikasi dengan baik ke dalam aktiva dan pasiva bagi stakeholders seperti pengamat ekonomi dan badan eksekutif pemerintah membutuhkan informasi daftar hutang dan rincian pembayarannya.

Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pelaporan keuangan pemerintahan berbasiskan riset terdahulu.

Tabel 1
Jenis Informasi Yang dibutuhkan Berbasis Riset Terdahulu

Jenis informasi	Anthony (1986)	Drebin (1981)	Jones (1985)	Daniels & Daniels (1991)	IFAC PSC studi 1 (1991)	Mack &Ryan (2006)	IPSAS 1 (2007)	Martinigsih (2008)	Armel(2010)
Kondisi keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Kondisi Ekonomi			√		√		√		√
Kepatuhan terhadap aturan	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Kinerja	√	√	√		√	√	√	√	√
Perencanaan dan penganggaran		√	√	√	√	√		√	√
Naratif						√		√	√

Sumber : Armel Yentifa (2010)

2. Pengembangan Hipotesis

Menurut Menurut Willy Nofranita (2011) informasi yang dibutuhkan oleh DPRD atas Pelaporan Keuangan antara lain: a) Informasi kondisi keuangan, informasi ini dibutuhkan oleh DPRD berkaitan dengan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah, untuk melihat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana pendapatan atau pengeluaran pemerintah pada periode yang bersangkutan. b) Informasi Kepatuhan terhadap aturan, DPRD

membutuhkan informasi penyelenggaraan APBD apakah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan. c) Informasi kinerja, Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan rencana srategik dan prioritas program yang telah ditetapkan serta dapat dipertangggungjawaban. d) Informasi Perencanaan dan Penganggaran mengenai informasi target penerimaan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran dimasa datang. DPRD membutuhkan informasi ini untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kepada program yang menjadi prioritas dalam pelaksanaannya dan perencanaan anggaran nantinya sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD.

Menurut Mardiasmo (2002), pemerintah sebagai manajemen publik salah satunya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), membutuhkan informasi atas pelaporan keuangan pemerintah. Informasi yang diperlukan oleh manajemen publik antara lain: a) Informasi Kondisi Keuangan, SKPD memerlukan informasi keuangan salah satunya informasi akuntansi untuk membantu perencanan dan pengendalian organisasi dan juga sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. b) Informasi Kinerja, informasi kinerja dibutuhkan untuk menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan dana sebijak mungkin dan juga untuk membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. c) Informasi Kepatuhan terhadap Aturan, Informasi ini diperlukan untuk melihat apakah pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapka. d) Informasi

Perencanaan dan Penganggaran, untuk melihat daftar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa terdapat perbedaan kebutuhan informasi keuangan, kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja serta informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang dipakai dalam penelitian adalah:

H1 = Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kondisi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah .

H2 = Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

H3 = Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kinerja yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

H4 = Terdapat perbedaan kebutuhan informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Dapat dijelaskan bahwa jenis informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan khususnya DPRD dan SKPD yaitu informasi mengenai kondisi keuangan, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, serta perencanaan dan penganggaran. Kebutuhan DPRD dan SKPD atas pelaporan keuangan akan dibandingkan.

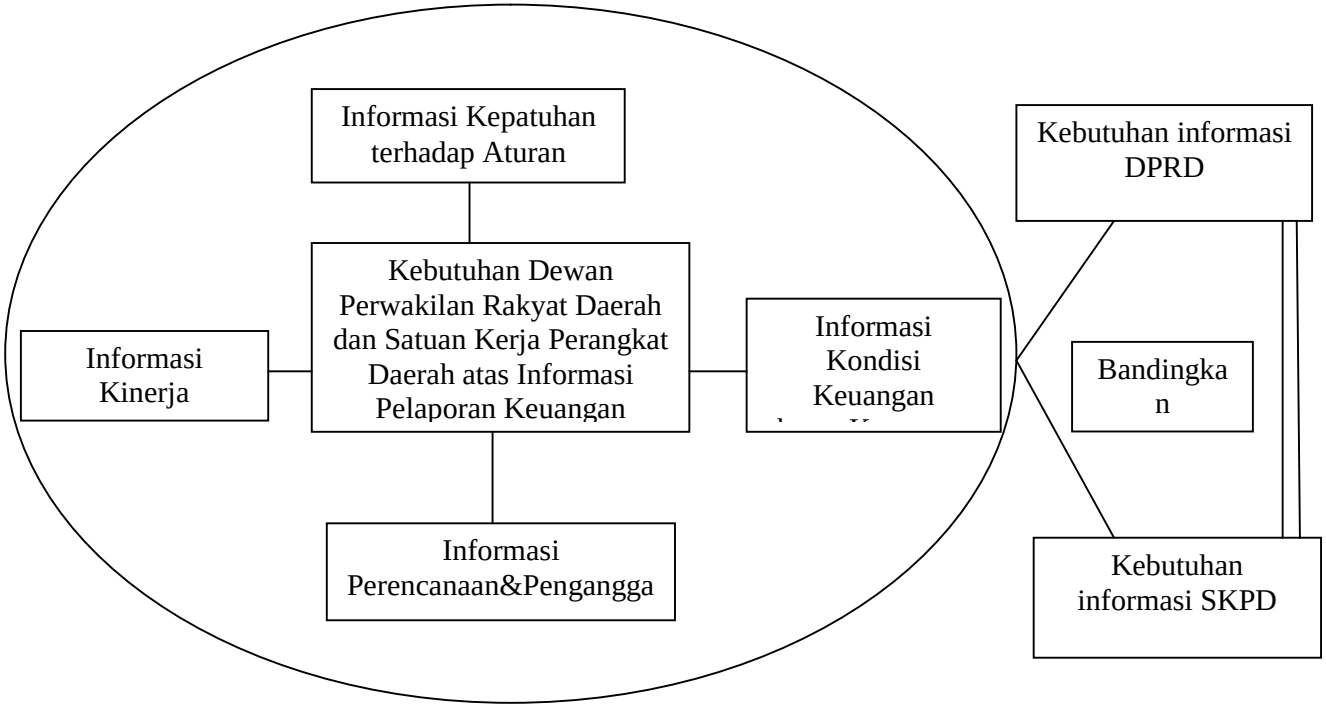
Informasi Kepatuhan terhadap Aturan
Kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas Informasi Pelaporan Keuangan
Informasi Kinerja
Informasi Kondisi Keuangan
Informasi Perencanaan&Pengangga
Kebutuhan informasi DPRD
Bandingka n
Kebutuhan informasi SKPD

D. HIPOTESIS

Hipotesis untuk menjawab rumusan masalah no. 1, 2, 3 dan 4 adalah:

H1 : Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kondisi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dengan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

H2 : Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kepatuhan terhadap aturan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

H3 : Terdapat perbedaan kebutuhan informasi kinerja yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

H4 : Terdapat perbedaan kebutuhan informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari penelitian mengenai "Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi kondisi keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi kepatuhan terhadap aturam yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Terdapat perbedaan antara informasi yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu informasi kinerja. Informasi kinerja lebih dibutuhkan oleh DPRD dibandingkan dengan SKPD.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara informasi perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan oleh DPRD dan SKPD atas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya.Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarkan.
2. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, sebaiknya eksekutif menyusun laporan keuangan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pengguna sehingga pengguna dapat menggunakan nya dengan baik untuk pengambilan keputusan.

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk melengkapi sampel pengguna laporan keuangan lain seperti masyarakat, investor, kreditor dan badan pengawas.